BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Instansi

Awal kelistrikan di Bumi Parahyangan sudah ada semenjak Pemerintah Kolonial Belanda masih bercokol di tataran tanah Sunda. Di tahun 1905, di Bandung berdiri perusahaan yang mengelola penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan publik. Nama perusahaan itu *Bandungsche Electriciteit Maatschaapij (BEM*).

Dalam perjalanannya, BEM pada tanggal 1 anuari 1920 berubah menjadi Perusahaan Perseroan menjadi *Gemeenschapplijk Electriciteit Bedrif Voor Bandoeng (GEBEO)* yang pendiriannya dikukuhkan melalui akte notaris Mr. Andrian Hendrik Van Ophuisen dengan Nomor: 213 pada tanggal 31 Desember 1949.

Setelah kekuasaan penjajahan beralih ke tangan Pemerintah Jepang, di antara rentan waktu 1942-1945, pendistribusian tenaga listrik dilaksanakan oleh *Djawa Denki Djigyo Sha Bndoeng Shi Sha* dengan wilayah kerja di seluruh Pulau Jawa.

Kemudian tahun 1957 menjadi awal penguasaan pengelolaaan penyediaan tenaga listrik di seluruh tanah air yang ditangani langsung oleh Pemerintah Indonesia.27 Desember 1957, GEBEO diambil alih oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian dikukuhkan lewat Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 1958 j.o. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1959.

Selanjutnya, di tahun 1961 melalui Peraturan Pemerintah No.67 dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU PLN) sebagai wadah

kesatuan pimpinan PLN. Sejalan dengan itu, PLN Bandung pun berubah menjadi *PLN Exploitasi XI* sebagai kesatuan BPU-PLN di Jawa Barat, di luar DKI Jaya dan Tanggerang.

Pada tahun 1970-an dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara yang menyebutkan status PLN menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara. Kemudian, berdasarkan Pengumuman PLN Exploitasi XI No. 0II/Sek/1975 tanggl 14 Juli 1975, PLN Exploitasi XI diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat.

Memasuki era 1990-an, dengan adanya Peraturan Permerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 1994 pada tanggal 16 Juni 1994**,** Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994.

Untuk memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, maka keluarlah Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 28. K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001 yang menjadi landasan hukum perubahan nama PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Pada akhirnya, dengan mengacu pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 120.K/010/DOR/2002 tanggal 27 Agustus 2002,PT PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat berubah lagi namanya menjadi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, dimana wilayah kerjanya meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten, hinga saat ini.

A. Visi dan Misi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

1. Visi

Sebuah perusahaan/instansi tentu mempunyai cita-cita untuk menjadikan perusahaan/instansinya itu menjadi sukses dan mencapai suatu keberhasilan.Cita-cita tersebut direalisasikan dalam sebuah visi sebagai berikut:

"Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani".

2. Misi

Dalam mencapai visi tersebut, ditetapkan misi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten sebagai berikut :

a. Melakukan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Logo PT PLN (Persero)



Sumber : PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten,2010

Gambar 2.1

Logo PT PLN (Persero)

Keterangan logo :

1. Bidang Persegi Panjang Vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan bermasyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

2. Petir atau Kilat

Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun melambangkan kerja cepat dan tepat para insan PT PLN dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warna cerah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju

perusahaan bersama tiap insan perusahaan serta keberanian dalam mengahadapi tantangan perkembangan zaman.

3. **Tiga Gelombang**

Memiliki arti daya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN guna memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu, biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Strukur Organisasi

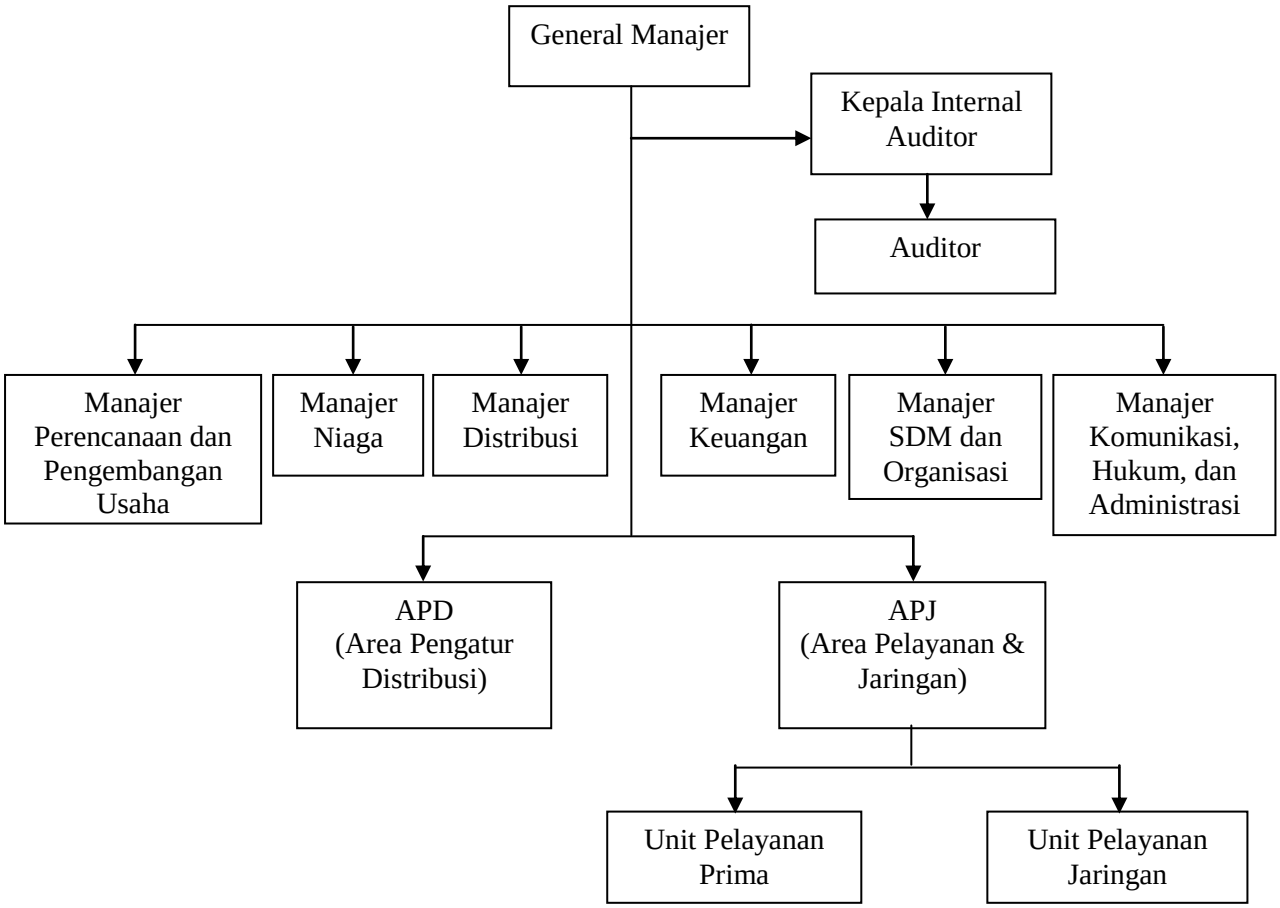
Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Struktur organisasi dan tugas pokok PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten ditetapkan berdasarkan Keputusan General Manager No.101.K/021/GM.DJBB/2004, pada tanggal 24 November 2004. Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten merupakan organisasi fungsional dan staff. Jenjang manajemen meliputi unsur pimpinan, pembantu pimpinan dan unsur pengawasan, yaitu Auditor Internal yang berada

dibawah dan tanggung jawab langsung kepada pimpinan yang merupakan pejabat tinggi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Secara garis besar stuktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten terdiri dari General Besar yang dibantu oleh beberapa Manager dan pengawasan secara internal,untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Struktur organisasi PT. PLN (Persero) DJBB

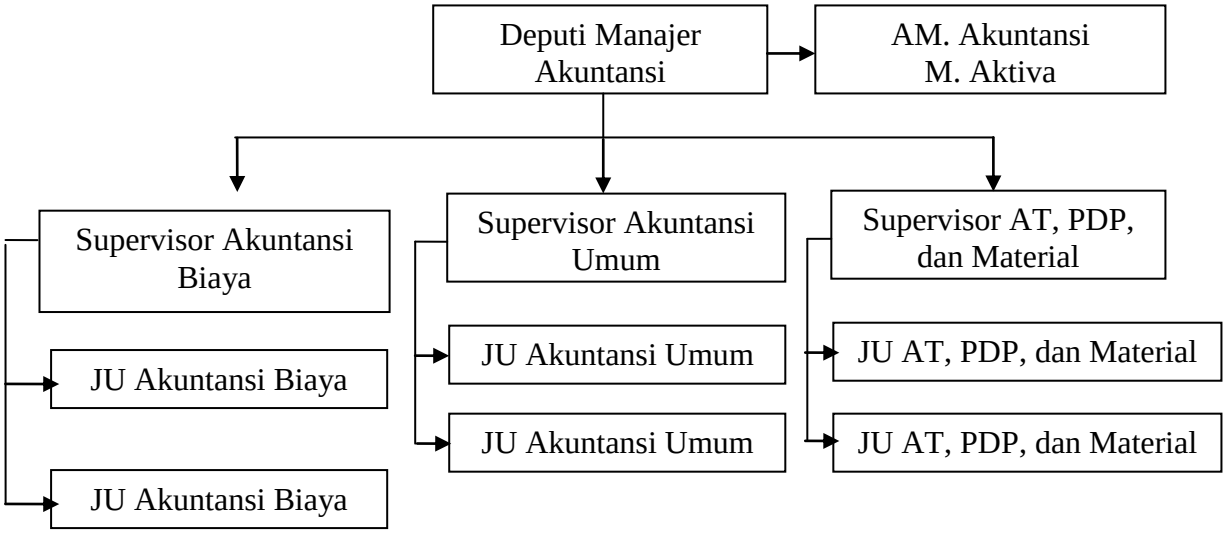


Sumber: Data Intern PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, 2010

Gambar 2.2.
Bagan Struktur Organisasi
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Mengingat Kerja Praktek penulis dilaksanakan dibagian Akuntansi. Maka, struktur organisasi bagian akuntansi dapat dilihat pada gambar dan uraian berikut ini:

Struktur Organisasi Bagian Akuntansi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten



Sumber: Data Intern PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten,2010

Gambar 2.3.
Bagan Struktur Organisasi Bagian Akuntansi
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

2.3 Deskripsi Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi yang telah di putuskan oleh General Manager Kantor Distribusi PP PLN (Persero) DJBB tanggal 15 Desember 2008 dengan nomor 078.K/GM.DJBB/2008 tersebut, masing-masing jabatan diuraikan sebagai berikut :

1. General Manajer

Seorang general manajer mempunyai beberapa tugas yang merupakan tanggungjawabnya,yaitu :

a. Memimpin, mengurus, mengelola distribusi sesuai dengan maksud dan tujuan disribusi serta menyiapkan rencana kerja tahunan distribusi lengkap dengan anggaran keuangan secara tepat waktu.
b. Mewakili distribusi di luar maupun di dalam pengadilan.
c. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan distributor serta menetapkan kebijakan distribusi di bidang perencanaan, pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik dan sumbaer daya manusia.
d. Melaksanakan kebijakan umum dalam mengurus distribusi yang telah digariskan oleh direksi.
e. Mengendalikan pelaksanaan tugas para Deputi Pimpinan dan Kepala Kontrol Intern.
f. Mengelola dan mengendalikan seluruh kegiatan berdasarkan Kebijakan Direksi dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Mengadakan dan memelihara tata buku dari administrasi distribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.

h. Menetapkan gaji/pensiun hari tua dan penghasilan lain dari pegawai serta mengatur hal kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pembantu Pimpinan

a. Manajer Perencanaan dan Pengembangan Usaha

Manajer perencanaan dan Pengembangan Usaha dibantu oleh Deputi Manajer Perencanaan Perusahaan, Deputi Manajer Pendanaan, dan Jabatan Kepakaran di Bidang Pengembangan Usaha. Adapun deskripsi jabatannya yaitu:

1) Deputi Manajer Perencanaan Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan korperat (*Business Plan*) serta rencana kerja dan anggaran perusahaan dari Unit Bisnis Distribusi.
2) Deputi Manajer Pendanaan bertanggung jawab atas penyediaan sumber dana untuk mendukung rencana kegiatan investasi dan operasi.
3) Kepakaran Pengembangan Usaha bertanggung jawab atas penyusunan rencana pengembangan usaha/analisa usaha sesuai dengan kaidah yang sehat.

b. Manajer Distribusi

Manajer Distribusi mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Menyusun rencana pengembangan sistem jaringan distribusi dan membina penerapannya.
2) Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi dan membina penerapannya.
3) Menyusun SOP untuk penerapan dan pengujian peralatan distribusi serta SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.

4) Menyusun desain standar konstruksi jaringan distribusi dan peralatan kerjanya serta membina penerapannya.
5) Mengevaluasi susut energy listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian tenaga listrik serta saran perbaikannya.
6) Menysusun metode kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan seta membina penerapannya.
7) Menyusun kebijakan manajemen jaringan distribusi dan kebijakan perbekalan distribusi seta membina penerapannya.
8) Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi jaringan distribusi.
9) Menyusun regulasi untuk penyempurnaan Data Induk Jaringan (DIJ).
10) Membantu dan mengevaluasi DIJ.

c. Manajer Niaga

Manajer Niaga dibantu Manajer Administrasi dan Jabatan Kepakaran. Adapun deskripsi jabatannya yaitu:

1. Deputi Manajer Administrasi Niaga bertanggung jawab atas pencapaian kinerja niaga (rasio, operasi, umur piutang, pendapatan, penjualan dan susut tenaga listrik) dan pengaturan transaksi niaga yang yang dilaksanakan di UPP/UPT/cabang, AREA yaitu transaksi jual/beli produk.
2. Kelompok kepakaran pengembangan sistem pelyanan yang meliputi:
    a) Kepakaran bisnis proses dan sistem prosedur pelayanan bertanggung jawab atas pembuatan bisnis proses unit pelaksana

antar unit pelaksana dan pembuatan sistem dan prosedur pelayanan untuk meningkatkan pelanggan.

b) Kepakaran regulasi pelayanan bertamggung jawab atas penyaiapan standar, regulasi pelayanan dan melaksanakan monitoring atau evaluasi untuk rumusan penyempuranaan atau perbaikan standar dan regulasi pelayanan.

c) Kepakaran sistem pelayanan pelanggan potensial bertanggung jawab atas tersedianya sistem pelyanan dan memfasilitasi UPP/UPT/cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan dan kontrak bisnis dengan pelanggan potensial untuknpencapaian pelanggan dan target peningkatan pendapat.

d) Kepakaran sistem pelayanan pelanggan umum bertanggung jawab atas tersedianya sistem pelayanan dan memfasilitasi UPP/UPT/cabang dan AREA dalam menyelenggarakan pelayanan.

e) Kepakaran riset kepuasan pelanggan bertanggung jawab atas penyelenggaraan riset/survey kepuasan pelanggan untuk mengetahui kebutuhan dab keinginan pelanggan guna peningkatan pelayanan pelanggan.

f) Kepakaran peningkatan kompetensi pelayanan dan niaga bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi pelayanan dan niaga unit-unit pelaksana dalam rangka pencapaian kinerja niaga.

3. Kelompok kepakaran pengembangan niaga yang meliputi:
    a) Kepakaran pengembangan pemasaran atau produk unggulan bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan pemasaran oleh unit pelaksana dengan memfasilitasi dan menyiapkan inovasi atau produk unggulan.
    b) Kepakaran riset dan inteligent pasar bertanggung jawab atas penyelenggaraan riset dan inteligent pasar untuk mengetahui peta dan rencana pengembangan pasar.
    c) Kepakaran negosiasi dan transaksi niaga bertanggung jawab atas pelaksanaan negosiasi dan transaksi niaga/kontrak bisnis dengan pihak eksternal UBD dan memfasilitasi transaksi kontrak bisnis di unit pelaksana.
    d) Kepakaran tarif atau harga bertanggung jawab atas pembuatan rumusan dan kajian pentarifan/harga atas transaksi niaga yang dapat menguntungkan perusahaan.
    e) Kepakaran PPTL/penertiban niaga bertanggung jawab atas pengaturan pelaksanaan PPTL/penertiban niaga dalam rangka pencapaian peningkatan target niaga.
    f) Kepakaran peningkatan produktivitas (EDP) bertanggung jawab atas peningkatan produktivitas (EDP) unit-unit pelaksana dalam pencapaian kinerja niaga.

d. Manajer Keuangan

Manajer Keuangan dibantu oleh deputi Manajer Pengendalian Anggaran, Deputi Manajer Pengelolaan Keuangan, Deputi Manajer Akuntansi dan Jabatan Kepakaran di bidang analis dan evaluasi sistem keuangan. Adapun deskripsi jabatannya yaitu:

1) Deputi Manajer Pengendalian Anggaran bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dn Monitoring Penggunaan Dana.
2) Deputi Manajer Pengelolaan Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dana arus kas secara akurat melaksanakan pengembangan sistem manajemen keuangan yang sehat serta pengelolaan keuangan yang menguntungkan serta menyiapkan data untuk Laporan Keuangan.
3) Deputi Manajer Akuntansi bertanggung jawab dalam menyiapkan informasi akuntansi yang akurat dan tepat waktu untuk semua pihak dan membantu manajemen dalam melaksanakan operasi perusahaan secara efisien dan efektif.
4) Kepakaran Keuangan bertanggung jawab dalam merencanakan pola pengelolaan dana yang menguntungkan serta melakukan analisa dan evaluasi keuangan.

e. Manajer SDM dan Organisasi

Manajer Sumber Daya Manusia dan Organisasi dibantu oleh Deputi Manajer Administrasi Sumber Daya Manusia, Deputi Manajer

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepakaran Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun deskripsi jabatannya yaitu:

1) Deputi Manajer Administrasi Sumber Daya Manusiabertanggung jawab atas terlaksananya pengelolaan penghasil dan emolumen, kesejahteraan dan kesehatan pegawai serta pension dan sistem pengelolaan data pegawai yang up to date dan penyajian informasi pegawai yang akurat serta pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
2) Deputi Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten melalui jenjang karir yang jelas.
3) Kepakaran Manajemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab atas pengembangan sistem sumber daya manusia.

f. Manajer Komunikasi, Hukum dan Administrasi.

Fungsi Bidang Komunikasi, Hukum dan Administrasi meliputi:

1) Menusun kebijakan dan mengelola komunikasi kemasyarakatan dan pelanggan baik internal maupun eksternal.
2) Menyusun kebijakan dan mengelola fasilitas kerja, sistem pengamanan dan manajemen kantor.
3) Menyusun kebijakan K3, lingkungan dan *community development.*
4) Menyusun kebijakan administrasi.
5) Menyusun dan mengkaji produk-produk hukum dan peraturan-peraturan perusahaan.

6) Memberikan advokasi dalam bisnis tenaga listrik dan ketenagakerjaan.
7) Menyusun standar fasilitas kantor.
8) Mengelola asset tanah dan bangunan serta sarana kerja.
9) Mengelola kesekretariatan dan rumah tangga kantor induk.
10) Menyusun laporan manajemen di bidangnya.

3. Unsur Pelaksanaan

a. Unit Organisasi Area Pelayanan dan Jaringan.

Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat laporan atas pencapaian pendapatan penjualan listrik, pelayanan pelanggan, pengoperasian, pemeliharaan jaringan distribusi di daerah kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kinerja unit.

b. Area Pengaturan Distribusi.

Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi serta membuat laporan atas kegiatan operasi pengaturan jaringan distribusi di daerah kerjanya secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kinerja unit.

4. Auditor Internal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana keputusan direksi No. 014.K/010/DIR/2003, dibantu oleh kepakaran seperti auditor teknik, auditor manajerial, auditor khusus, jabatan dan formasi tenaga kerjanya ditetapkan General Manajer.

a. **Audit Sistem Distribusi**, bertanggung jawab atas pembianaan dan penilaian audit bidang distribusi dalam menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas pencapaian tugas kerja.
b. **Audit Sistem Administrasi dan Umum**, bertanggung jawab atas pemberian dan penilaian audit bidang administrasi dan umum dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas target kinerja.
c. **Audit Keuangan dan Pendapatan**, bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit yang berkaitan dengan masalah keuangan dan pendapatan dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas target kinerja.
d. **Audit Mutu Layanan**, bertanggung jawab atas pembinaan dan penilaian audit yang berkaitan dengan masalah mutu layanan dalam rangka menghasilkan rekomendasi bagi perbaikan dan kemajuan proses bisnis yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas target kinerja

Adapun deskripsi jabatan bagian akuntansi pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten adalah sebagai berikut:

1. **Deputi Manajer Akuntansi**

   Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan, mencakup bidang-bidang penyusunan anggaran yang menggunakan metodologi serta data yang akurat, pembelanjaan dan pengendalian keuangan, baik konstruksi maupun pengusahaan, tata usaha

langganan, termasuk sistem pelaporan dan akuntansi juga membuat laporan dalam bidangnya.

2. AM Akuntansi (Ahli Madya Akuntansi)

a. Menerima LP (Laporan Pemeliharaan) dan LK (Laporan Keuangan) dari cabang-cabang.

b. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan pendataan.

c. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

3. Supervisor Akuntansi Umum

Tugasnya adalah:

a. Mengevaluasi dan verifikasi J-01 dan J-02.

b. Mengevaluasi dan verifikasi nota masuk dan nota keluar wilayah atau distribusi lain.

c. Mengevaluasi dan verifikasi hasil rekonsiliasi utang pajak, J-24, piutang pegawai, piutang rekening listrik, bank, dana pensiun, YPK.

d. Mengevaluasi dan verifikasi pembuatan LP KD bulanan, triwulan, semester dan tahunan.

e. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara..

4. Supervisor Akuntansi Verifikasi

Tugasnya adalah:

a. Menerima LHP Internal Auditor, Akuntan Publik dan SPI:

b. Diverifikasi dan memonitor serta menerima Surat Tanggapan Cabang atas LHP Internal Auditor, Akuntan Publik dan SPI untuk selanjutnya dilaporkan ke DMAK.

c. Menerima LP dan LK dari cabang-cabang:

   1. Mendistribusikan LP dan LK cabang ke seluruh staf akuntansi untuk verifikasi.

   2. Memonitor dan menerima hasil verifikasi dari staf akuntansi untuk selanjutnya dikirim ke cabang/unit.

d. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara.

e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

5. Supervisor Akuntansi AT dan PDP

Tugasnya adalah:

a. Menerima laporan cabang-cabang untuk selanjutnya didistribusikan ke staf akuntansi AT dan PDP untuk diproses lebih lanjut.

b. Menerima hasil verifikasi dari staf akuntansi AT dan PDP mengenai daftar B, C, D, E, F, DPAT dan PMAT.

c. Meneliti usulan relokasi/penghapusan dari cabang (AE 1 + 1.1) diteruskan ke staf akuntansi AT dan PDP untuk dibuat dan diverifikasi usulan relokasinya (AE 2.2.1 dan AE 3.3.1)

d. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara.

e. Membuat laporan hasil inventarisasi.

f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

6. Juru Utama Akuntansi Umum

a. Memonitor piutang rekening listrik;

Mencocokan data akuntansi dengan data bagian niaga, cabang dengan *GL Magic* untuk selanjutnya digabung sebagai bahan menyusun LK UBD Jawa Barat.

b. Memonitor biaya penyambungan (BP).

c. Memonitor uang jaminan langganan.

d. Verifikasi LP dan LK cabang serta melaporkan hasil verifikasi kepada supervisor verifikasi.

e. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara.

f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dari atasan.

7. Juru Utama Akuntansi AT dan PDP.

a. Membuat laporan aktiva tetap:

Diinput dan diverifikasi lalu diproses ke dalam aplikasi AT-DTE.

b. Memonitor laporan daftar F:

Setelah dicocokan dengan LP, PMAT dan DPAT selanjutnya hasilnya untuk dilaporkan.

c. Verifikasi LP dan LK cabang serta melaporkan verifikasi ke supervisor verifikasi.

d. Melaksanakan inventarisasi fisik material, AT dan PDP, rekening listrik, kas dan bank sampai pembuatan dan penandatanganan berita acara.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Di Indonesia penyelenggaraan fasilitas kelistrikan untuk umum dikelola oleh PLN mulai dari pembangkit sampai dengan *end user* menggunakan jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah, tegangan rendah, gardu-gardu induk dan penyediaan pembangkit sendiri (*Captive Power*) untuk kepentingan sendiri terutama di lokasi yang belum terjangkau oleh jaringan PLN. Namun, kondisi ini mulai berubah beberapa tahun terakhir karena keterbatasan dana dan tuntutan pemenuhan terhadap masyarakat. Pemerintah mulai membuka peluang atau modal swasta untuk memasuki bisnis kelistrikan, kebijakan ini seiring dengan pola perkembangan global dunia.

Selain aktivitas kerja tersebut, PT PLN (Persero) DJBB mempunyai tujuan yang tidak hanya mencari laba karena sebagai perusahaan milik negara yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, PLN bertugas untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup memadai dan mutu yang sangat baik untuk dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Dengan tidak menyimpang dari tujuan utama untuk dapat membangun ekonomi, ketahanan nasional serta meningkatkan derajat masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam bidang penguasaan tenaga listrik, sehingga PLN memiliki tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatkan jumlah langganan;
2. Meningkatkan daya yang terpasang;

3. Meningkatkan penjualan KWH (tenaga listrik) kepada pelanggan.

PLN distribusi adalah satuan administrasi yang tidak memiliki fasilitas pembangkit dan transmisi. Unit ini membeli energinya dari unit PLN lainnya yang diterima melalui Gardu Induk (GI). Seluruh pulau Jawa yang menyerap hampir 80% volume penjualan tenaga listrik seluruh Indonesia dikelola oleh empat PLN Distribusi yang berfunsi sebagai unit koordinatif. Salah satu unit distribusi tersebut adalah PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Jawa Barat kecuali Tangerang.

Luas wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten menjangaku lebih dari 42.196 km² yang meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten kecuali Tangerang. Wilayah dan beban kerja yang demikian besarnya dikelola oleh Unit-unit Pelaksana Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) dan Area Pengatur Distribusi (APD), dengan komposisi sebagai berikut:

a. Area Pelayanan Jaringan (APJ) : 16 unit

b. Area Pengatur Distribusi (APD) : 1 unit

c. Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) : 90 unit

d. Unit Pelayanan dan Jaringan Prima (UPJ Prima) : 7 unit

e. Kantor Pelayanan (KP) : 191 KP

Adapun unit-unit pelaksana tersebut adalah (APD Bandung) antara lain:

1. APJ Bandung	9. APJ Depok
2. APJ Banten Utara	10. APJ Garut
3. APJ Banten Selatan	11. APJ Karawang
4. APJ Bekasi	12. APJ Majalaya
5. APJ Bekasi	13. APJ Purwakarta
6. APJ Bogor	14. APJ Sukabumi
7. APJ Cimahi	15. APJ Sumedang
8. APJ Cirebon	16. APJ Tasikmalaya

Fungsi masing-masing cabang tersebut adalah untuk mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen, membangun jaringan distribusi, pelayanan langganan dengan sistem pembendaharaan serta melaporkan kegiatannya dengan membuat laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Tenaga listrik yang disalurkan kepada konsumen adalah tenaga listrik yang dibangkitkan dari beberapa pusat tenaga listrik yang ada di Jawa Barat. Dari pusat tenaga listrik tersebut ditransmisikan lagi ke gardu-gardu induk. Kemudian ditransmisikan lagi ke gardu-gardu cabang dan akhirnya sampai kepada konsumen.